

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG
BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019) .**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

WIWA CHINDY FILLIANDRI

1510111161

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofian, S.H., M.H

Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019) .

(Wiwa Chindy Filliandri, 1510111161, Fakultas Hukum, 2020, Halaman 52)

ABSTRAK

Peranan perwakilan rakyat dalam sebuah negara atau daerah bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari para eksekutif tetapi dipandang sebagai upaya untuk menjamin tercapainya kepentingan rakyat dalam suatu kebijakan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran strategis dalam mengawasi pemerintah daerah, memberikan arti bahwa wakil rakyat tersebut adalah sungguh menjadi alat kontrol bagi para aparat pemerintah daerah didalam menjalankan kewenangannya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan sehingga terwujudnya *Good Governance*. Hal ini lebih terlihat menonjol lagi ketika era reformasi dan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran sentral dalam doktrin kedaulatan rakyat untuk melakukan kontrol. Rumusan masalah yang terkandung dalam permasalahan ini adalah bagaimana implementasi terhadap pengaturan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan aparatur Pemerintah yang bebas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 menurut UUD 1945 dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah. Permasalahan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan gejala-gejala masyarakat. Kontrol merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan serta mengajak dan mengarahkan aparat pemerintah untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kontrol yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat ataupun aparat pemerintah daerah yang berperilaku menyimpang. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kota Pariaman dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja serta reses.